

**PENILAIAN PULAU KECIL SEBAGAI DASAR PENGEMBANGAN  
INVESTASI EKOWISATA (Studi Kasus Pulau Tidung Kecil,  
Kabupaten Kepulauan Seribu, DKI)**

***Assessment of Small Island As A Basis For Ecotourism  
Investment Developing(Case Study Tidung Kecil Island,  
Kepulauan Seribu Regency, DKI)***

**\*Puguh W. Widodo, Rahmat Kurnia dan Sulistiono**

Institut Pertanian Bogor

Jl. Raya Darmaga Kampus IPB Darmaga Bogor 16680

\*email: puguh98200@gmail.com

Diterima 13 April 2015 - Disetujui 6 Juni 2015

**ABSTRAK**

Pulau Tidung Kecil merupakan pulau kecil tidak berpenduduk yang mempunyai potensi untuk pengembangan ekowisata. Penelitian ini bertujuan untuk menghitung indeks investasi ekowisata yang akan menentukan kelayakan investasi ekowisata pulau kecil. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode survey dengan menggunakan analisis indeks. Pengumpulan data primer dilakukan dengan observasi dan analisis peta, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pulau Tidung Kecil mempunyai nilai *natural resources and geostrategic island index (NI)* sebesar 3,67, *governemance index (GI)* sebesar 4,20, *infrastructure index (II)* sebesar 3,22 dan, *sosio economic and culture index(SI)* sebesar 2,64. Sehingga dengan formulasi *Small Island Investmen Index (SIII)* didapatkan indeks investasi pulau sebesar 3,69. Dari nilai indeks tersebut, Pulau Tidung Kecil dapat dikategorikan kedalam pulau dengan kelayakan investasi siap. Sehingga Pulau Tidung Kecil bisa direkomendasikan sebagai pulau yang layak untuk pengembangan investasi ekowisata.

**Kata Kunci: indeks, ekowisata, investasi, Pulau Tidung Kecil, kelayakan investasi**

**ABSTRACT**

*Tidung Kecil Island is the unhabited small island that have ecotourism development potential. The aims of this study is to calculate the index of ecotourism investment that will determine the investment feasibility of small island ecotourism. Method used in this study was a survey method with index analysis. Primary data collection was done by observation and map analysis, while the secondary data obtained by study of literature. Results showed that the Tidung Kecil Island have a value of natural resources and geostrategic island index (NI) of 3.67, governemance index (GI) of 4.20, infrastructure index (II) of 3.22 and, socio-economic and culture index (SI) of 2.64. So that with the Small Island Investment Index (SIII) formulation index obtained the investment index island of 3.69. From the index value Tidung Kecil Island can be categorized into the island with the feasibility of ready investment. So Tidung Kecil Island can be recommended as a viable island for the development of ecotourism investment.*

**Keywords: index, ecotourism, investment, Tidung Kecil Island, feasibility investment**

## PENDAHULUAN

Menurut UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 27 tahun 2007, pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km<sup>2</sup> beserta kesatuan ekosistemnya. Sebagai negara kepulauan, pulau kecil mempunyai arti penting dalam segi ekonomi, sosial, budaya maupaun pertahanan keamanan.

Pulau kecil menyimpan berbagai sumber daya alam dan jasa – jasa lingkungan yang terdiri atas sumber daya dapat pulih (*renewable resources*) atau sering juga disebut sumberdaya alam hayati dan sumberdaya tidak dapat pulih (*nonrenewable resources*) atau disebut sumberdaya alam non hayati. Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan pulau-pulau kecil, antara lain: sebagian besar penduduk pulau-pulau kecil merupakan kawasan tertinggal, terbatasnya sarana dan prasarana dasar seperti listrik, air, dan transportasi yang menghubungkan antar pulau, pulau-pulau kecil terluar memiliki potensi konflik atas pelanggaran batas wilayah, masih terbatasnya data dan informasi mengenai pulau – pulau kecil.

Indonesia mempunyai ribuan pulau kecil yang sangat potensial untuk dikembangkan. Menurut Dahuri (2013), sebagai negara kepulauan (*archipelagic country*) terbesar di dunia, salah satu potensi pembangunan yang besar yang sampai sekarang belum dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan adalah sumber daya wilayah pulau-pulau kecil. Pulau-pulau kecil di Indonesia mempunyai keindahan yang potensial untuk dikembangkan investasi ekowisata (Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, 2014). Akan tetapi tidak setiap pulau kecil siap untuk menerima investasi. Banyak faktor yang mempengaruhi masuknya investasi di pulau kecil. Perkembangan investasi di suatu kawasan tidak hanya ditentukan oleh investor, tetapi juga ditentukan oleh regulasi dalam melayani masyarakat di samping kondisi prasarana dasar wilayah (bangunan fisik) sebagai unsur pokok dalam memberi layanan atau kemudahan kepada calon investor (Pandiadi dan Warsono, 2012)

Pulau Tidung Kecil merupakan pulau yang tidak berpenduduk. Pulau ini sangat potensial untuk dikembangkan mengingat letaknya yang dekat dengan Pulau Tidung Besar yang sudah berkembang. Lahan pulau belum dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah daerah.

Dengan potensi yang dimiliki, Pulau Tidung Kecil diwacanakan sebagai lokasi pengembangan ekowisata. Melalui makalah ini, menilai kelayakan Pulau Tidung Kecil dari segi sumber daya alam dan strategis geografis, tata kelola pemerintahan, infrastruktur serta sosial ekonomi budaya untuk pengembangan investasi ekowisata, sehingga akan menjadi rekomendasi bagi kebijakan pemerintah dalam penetapan Pulau Tidung Kecil sebagai sasaran pengembangan investasi ekowisata.

## METODOLOGI

### Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pulau Tidung Kecil Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Penelitian tersebut dilakukan pada bulan Juli - Agustus 2014.

### Jenis dan Sumber Data

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode survey. Ruang lingkup penelitian yang terdapat di Pulau Tidung Kecil meliputi ketersediaan sumberdaya hayati dan jasa lingkungan, ketersediaan sumberdaya non hayati, indikator tata kelola pemerintahan, infrastruktur dan sosial ekonomi budaya. Data yang diperlukan bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara, observasi lapangan dan pengamatan peta citra, sedangkan data sekunder diperoleh dari pihak kedua (instansi terkait) melalui studi literatur.

### Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis sesuai lingkup penelitian, yaitu :

#### Analisis Pulau-pulau Kecil Bernilai Tinggi

Adrianto *et al.* (2011) dalam Direktorat Pendayagunaan Pulau-pulau Kecil (2011) menyatakan bahwa untuk menentukan pulau-pulau kecil yang bernilai tinggi dan layak investasi ekowisata dilakukan dengan menghitung nilai indeks investasi pulau-pulau kecil (*small island investment index*, SIII), yaitu melihat empat kelompok indeks. Kelompok indeks tersebut adalah:

- i) Indeks sumber daya alam dan geo-strategis pulau (*Natural resources and geo-strategic island index*, NI)
- ii) Indeks tata kelola pemerintah/(*Governance index*, GI)
- iii) Indeks infrastruktur (*Infrastructure index*, II)

iv) Indeks sosial ekonomi dan budaya (*Social economic and culture index, SI*)

Masing-masing indeks memiliki sub-sub kriteria pembentuk indeks yang dinamakan parameter, dimana parameter mempunyai indikator yang menerangkan derajat kepentingan yang dikuantifikasi dalam bentuk skor antara 1 – 5. Penentuan skor 1 – 5 pada masing – masing indikator didasarkan pada persepsi dari tingkat kepentingan masing-masing indikator dalam parameter. Dimana semakin besar angka yang diperoleh suatu indikator menunjukkan tingginya kualitas dan kepentingan indikator tersebut dalam parameter.

Penetapan bobot NI yang lebih besar menunjukkan bahwa investasi di pulau-pulau kecil didasarkan pada prinsip kelayakan sumber daya alam dan jasa lingkungan yang terdapat di wilayah pulau kecil tersebut. Porsi bobot lebih tinggi juga diberikan kepada komponen GI yang menunjukkan bahwa tata kelola yang baik merupakan salah satu kunci keberhasilan pengembangan investasi pulau kecil, baru kemudian diikuti bobot II dan SI.

Indeks investasi pulau-pulau kecil (SIII) sendiri memiliki nilai indeks antara 1 – 5, demikian juga masing – masing kriteria penyusunnya juga memiliki besaran nilai skor antara 1 sampai dengan 5, dengan bobot indeks berturut-turut untuk *natural resources and geostrategic island index* (NI) sebesar 0,4, *governance index* (GI) sebesar 0,3, *infrastructure index* (II) sebesar 0,2 dan *social-economic index* (SI) sebesar 0,1. Formula yang digunakan untuk menghitung indeks investasi pulau-pulau kecil dalam rangka penentuan pulau kecil yang bernilai tinggi adalah (Adrianto *et al.*, 2011 dalam Direktorat Pendayagunaan Pulau-pulau Kecil, 2011):

$$SIII = \alpha * NI + \beta * GI + \varphi * II + \Omega * SI$$

Dimana/Where:

SIII = *Small Island Investment Index*

NI = *Natural resources and geostrategic island Index*

$\alpha$  = Bobot NI = 0,4

GI = *Governance Index*

$\beta$  = Bobot GI = 0,3

II = *Infrastructure Index*

$\varphi$  = Bobot II = 0,2

SI = *Socio economic and culture Index*

$\Omega$  = Bobot SI = 0,1

*Natural resources and geo-strategic island index (NI)*

Kriteria dan indikator sumberdaya alam merupakan faktor kunci untuk investasi di PPK. Minat investor untuk berinvestasi sangat terkait dengan keberadaan sumber daya alam dan lingkungan yang terdapat di PPK. Sedangkan faktor strategis geografis kendati merupakan faktor pendukung, akan tetapi juga memegang peranan penting terkait dengan posisi geo-strategis dari pulau yang akan dikembangkan untuk kegiatan investasi.

Geografi pulau kecil mencakup aspek jarak dan posisi pulau induk, ketinggian pulau, tingkat kerentanan bencana alam, jarak ke pusat pemerintahan, kemudahan pencapaian PPK dan jarak ke pusat aktivitas ekonomi. Semakin dekat dengan pusat ekonomi, maka semakin tinggi nilai ekonomi pulau tersebut. Elroy dan Lucas (2014) menyatakan bahwa kesejahteraan masyarakat pulau sebagian ditentukan oleh kedekatan dengan pasar. Jarak ke pusat pemerintahan juga akan mempengaruhi tingginya skor, dimana semakin dekat dengan pusat pemerintahan, maka nilainya akan semakin tinggi.

Akses menuju PPK didasarkan pada tingkat dan kriteria moda transportasi, kondisi sarana transportasi, waktu tempuh, tingkat ketersediaan dan frekuensi perjalanan. Untuk satu pulau yang jauh namun dapat dijangkau dalam waktu cepat akan memiliki skor yang lebih tinggi. Kriteria parameter sumber daya alam mencakup terumbu karang, sumber daya ikan, pariwisata, budidaya laut, dan konservasi.

Kriteria baku kerusakan terumbu karang ditetapkan berdasarkan prosentase luas tutupan terumbu karang yang hidup. Terumbu karang akan sangat baik sekali bila penutupan karang hidupnya mencapai 75-100 %. (Kementrian Negara Lingkungan Hidup, 2001)

*Governance Index (GI)*

Tata kelola pemerintahan juga akan menentukan baik tidaknya iklim investasi di suatu daerah. Tata kelola pemerintahan yang baik akan menentukan tata kelola PPK secara baik dan berkelanjutan karena akan membarikan kepastian hukum pada investor. Patokan seorang investor menanamkan modalnya adalah keamanan dan payung hukum yang berlaku (Isrok, 2009).

Dalam penyusunan kriteria pengembangan investasi PPK yang bernilai ekonomi tinggi, maka tata kelola pemerintahan terhadap pengembangan dan pembangunan PPK akan lebih banyak ditekankan pada sistem administrasi pengelolaan, kebijakan dan status penguasaan PPK. Berbagai instrumen tata kelola pemerintahan tersebut dijadikan parameter dari kriteria tata kelola PPK, selanjutnya ditentukan indikator serta menentukan skor dari 1 sampai 5. Secara umum semakin lengkap dan semakin baiknya setiap parameter tata kelola PPK dapat diterapkan, maka semakin tinggi skor yang akan diperoleh.

Mengingat setiap parameter memiliki tingkat kepentingan, fungsi dan skala prioritas yang berbeda-beda kedudukannya di PPK, maka pemberian bobot pun akan berbeda pula. Sebagaimana diketahui bahwa penerapan tata kelola pemerintah pada PPK mendapatkan kendala dan hambatan yang sulit. Dengan demikian pemberian bobot antara 0 dan 1 memperhatikan pada kemudahan atau bisa tidaknya setiap parameter dalam melaksanakan tata kelola yang baik dan berkelanjutan. Misalnya, apakah peruntukan lahan pada suatu PPK sudah ada apa belum dalam RTRWN atau RTRWP dan RTRWK. Dalam hal ini keberadaan RTRW sangat penting karena berhubungan dengan zonasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Penetapan rencana zonasi dimaksudkan untuk memelihara keberlanjutan sumber daya pulau-pulau kecil dalam jangka panjang serta mengeliminir berbagai faktor tekanan terhadap ekosistem pulau-pulau kecil akibat kegiatan yang tidak sesuai (*incompatible*) (Suparno, 2009).

#### *Infrastructure Index (II)*

Infrastruktur atau sarana memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara, termasuk Indonesia. Pertumbuhan dan perkembangan investasi di suatu kawasan dapat dipicu oleh dukungan prasarana dasar wilayah (Pandiadi dan Warsono, 2012). Infrastruktur bersifat publik dan sosial biasanya disediakan oleh pemerintah. Beberapa fasilitas yang termasuk ke dalam kelompok infrastruktur yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah di PPK adalah jalan, sarana air bersih, listrik, jembatan, pelabuhan, sarana komunikasi, ketersediaan pos keamanan, ketersediaan kantor administrasi pemerintah.

Beberapa infrastruktur yang tersedia di PPK jika telah ada atau akan dikembangkan dapat

dijadikan parameter dalam melakukan penilaian pengembangan investasi yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Berbagai parameter dari kriteria infrastruktur ditentukan indikator untuk menentukan skor dari 1 sampai 5. Secara umum semakin lengkap dan semakin baiknya setiap parameter yang ada di PPK, maka semakin tinggi skor yang akan diperoleh.

Mengingat setiap parameter memiliki tingkat kepentingan, fungsi dan skala prioritas yang berbeda-beda kedudukannya di PPK, maka pemberian bobot akan berbeda. Sebagaimana diketahui bahwa PPK memiliki keterbatasan-keterbatasan yang signifikan. Dengan demikian pemberian bobot antara 0 dan 1 memperhatikan pada kemudahan atau ada tidaknya parameter yang ditetapkan di PPK yang akan dikembangkan.

#### *Socio-Economic Index (SI)*

Kriteria *socio-economic index* (SI) ditentukan berdasarkan beberapa parameter yang dapat menggambarkan nilai PPK dari aspek sosial, ekonomi dan budaya. Parameter tersebut diantaranya adalah: nilai sejarah PPK, jumlah penduduk, kepadatan penduduk, potensi luas daratan pulau untuk pengembangan investasi, potensi ekonomilokal, tingkat pendapatan penduduk, nilai ekonomi sumberdaya PPK, keamanan PPK, budaya dan adat istiadat, persentase tingkat pendidikan.

Masing – masing PPK mempunyai nilai sejarah sendiri-sendiri, oleh sebab itu sejarah yang merupakan catatan perkembangan daerah sekitar memberikan gambaran nilai penting dari keberadaan pulau itu sendiri. Oleh sebab itu nilai sejarah merupakan salah satu parameter penting dalam penentuan status kelayakan pengembangan investasi sebuah pulau, karena semakin besar nilai sejarah yang dimiliki PPK, maka semakin besar perhatian rakyat dan pemerintah untuk mengembangkan serta menjaga keberlangsungan pulau tersebut.

Ada perbedaan pengelolaan pulau berpenduduk dan tidak berpenduduk. Dalam persoalan investasi, pulau tidak berpenduduk akan lebih mudah dibandingkan dengan pulau yang berpenduduk, karena pulau yang berpenduduk mempunyai banyak kepentingan di dalamnya. Namun demikian, bila pulau yang akan dikembangkan berpenduduk, maka batasan jumlah penduduk yang memungkinkan ada di sekitar pulau dapat dijadikan sebagai indikator kelayakan pulau

untuk aspek sosekbud dalam penentuan pulau kecil yang bernilai ekonomi tinggi untuk mendukung investasi.

Salah satu kebutuhan pengembangan investasi adalah adanya ketersediaan lahan yang dapat digunakan untuk kegiatan investasi itu sendiri. Oleh karena itu, penting membuat kriteria yang dapat menunjukkan ketersediaan lahan, yaitu dengan menghitung potensi luas area untuk pengembangan (luas daratan pulau) dan juga kepadatan penduduk.

Secara umum, sangat penting pembuatan kebijakan bagi perkembangan ekonomi lokal pulau kecil melalui pengembangan kerajinan yang sesuai, mengingat masyarakat pulau kecil memiliki keterbatasan sumber daya alam (Camilleri dan Falzon, 2013). Sebuah pulau harus mempunyai komoditas yang spesial sebab pulau kecil mempunyai kekurangan dalam perdagangan karena terisolasi (Poirine, 2014). Potensi ekonomi lokal adalah salah satu parameter yang dinilai dalam menentukan PPK bernilai ekonomi tinggi. Banyaknya peluang pemanfaatan di sekitar pulau berpotensi menurunkan tekanan terhadap sumber daya, karena adanya ketersediaan *alternatif income generating*.

Tingkat pendapatan penduduk merupakan kriteria penting untuk melihat kelayakan hidup

penduduk, semakin tinggi tingkat pendapatan penduduk, semakin tinggi tingkat kepentingan penduduk terhadap keberadaan sumber daya alam dan lingkungan di sekitar pulau.

Pulau kecil merupakan satu kesatuan ekosistem yang berada di dalamnya. Maka dari itu dalam menentukan nilai ekonomi seharusnya tidak dinilai berdasarkan pada fisik lahan/daratannya saja, melainkan harus dinilai secara menyeluruh berdasarkan fungsi ekologi, ekonomi, sosial dan budaya dari pulau itu sendiri. Nilai ekonomi sumberdaya PPK harus dilihat berdasarkan nilai ekonomi total dari pulau sebagai sebuah ekosistem yang saling berinteraksi dan berkaitan satu dengan lainnya. Nilai ekosistem PPK minimal tercermin dari adanya nilai ekosistem hutan mangrove, padang lamun dan terumbu karang, sedangkan nilai lahan PPK didekati dengan menggunakan pendekatan nilai jual objek pajak (NJOP) dalam penentuan pajak bumi dan bangunan (PBB). Nilai ekonomi ekosistem utama di wilayah pesisir dan laut, seperti hutan mangrove, padang lamun dan terumbu karang berdasarkan hasil kajian KLH (1999) dalam Direktorat Pendayagunaan Pulau-pulau Kecil (2011) sebagai basis perhitungan nilai ekonomi ketiga ekosistem utama tersebut, yaitu berturut-turut sebesar US\$ 15.877,42 persatuan hektar hutan mangrove, US\$ 48.620,13 per satuan hektar padang lamun dan US\$ 140.770,52 per satuan hektar terumbu karang.

**Tabel 1. Kategori Penentuan PPK Bernilai Tinggi Untuk Mendukung Investasi Ekowisata.**  
**Table 1. Small Island High Value Determination Categories to Ecotourism Investment Support.**

Nilai Index/Index Value (SIII)	Kategori/Categories	Keterangan/information
>4 – 5	Sangat siap/ Very ready	Sangat prioritas dan bernilai tinggi untuk listing investasi, karena seluruh kriteria investasi terpenuhi/ <i>Very priority and high value for the investment listing, because all investment criteria complete</i>
>3 – 4	Siap/ Ready	Prioritas dan bernilai sedang untuk listing investasi, karena sebagian besar kriteria investasi terpenuhi/ <i>Priority and moderate value for the investment listing, because partially investment criteria complete</i>
>2 – 3	Kurang Siap/ Less ready	Kurang prioritas dan bernilai rendah untuk listing investasi, karena sebagian kecil kriteria investasi terpenuhi/ <i>Less priority and less value for the investment listing, because small partially investment criteria complete</i>
1 – 2	Tidak Siap/ Not ready	Tidak Prioritas dan bernilai sangat rendah untuk listing investasi, karena tidak ada kriteria investasi terpenuhi/ <i>Not priority and low value for the investment listing, because nothing investment criteria complete</i>

Peluang investasi dapat dimanfaatkan menjadi motor devisa ketika keamanan dan konduktifitas terjamin. Jaminan keamanan ini mutlak diperlukan untuk memberikan rasa nyaman terhadap besarnya dana yang diinvestasikan terhadap pulau kecil tersebut. Budaya dan adat istiadat masyarakat lokal pulau adalah salah satu faktor penting dalam pengembangan PPK. Dalam implementasi pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan, di PPK berbasis komunitas lokal harus selalu mengedepankan keseimbangan antara pelestarian sumber daya alam dan lingkungan dengan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, parameter budaya dan adat istiadat menjadi salah satu parameter penting dalam penentuan kriteria PPK bernilai ekonomi tinggi untuk mendukung investasi.

Dalam konteks pengembangan investasi, ketersediaan tenaga kerja lokal menjadi salah satu faktor yang dapat mendorong keberhasilannya. Salah satu kriteria yang dapat menunjukkan ketersediaan tenaga kerja terdidik adalah adanya masyarakat terdidik di pulau tersebut. Oleh karena itu, kriteria presentase tingkat pendidikan diperlukan dalam penentuan pulau kecil yang bernilai ekonomi tinggi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Pulau Tidung Kecil merupakan pulau yang dihubungkan dengan Pulau Tidung Besar dengan jembatan. Secara administratif pulau ini terletak di Kelurahan Pulau Tidung, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan dengan titik koordinat 5° 48' 11" LS dan 106° 31' 24" BT. Pulau Tidung Kecil tidak berpenduduk tetapi menopang kegiatan pariwisata di Pulau Tidung Besar (Direktorat Pendayagunaan Pulau-pulau Kecil, 2011). Status kepemilikan pulau merupakan milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan peruntukannya diserahkan kepada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Dinas Pertanian dan Kelautan Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Pulau ini memiliki pantai pasir putih dengan vegetasi pulau antara lain kelapa, cemara laut, ketapang, sukun, dan mangga. Saat ini pemanfaatan pulau digunakan sebagai pusat bibit oleh Dinas Pertanian dan Kelautan Provinsi DKI Jakarta (Surapati, 2012).

### **Potensi Sumber Daya dan Strategis Geografis**

Berdasarkan Direktorat Pendayagunaan Pulau-pulau Kecil (2012), Pulau Tidung Kecil

mempunyai luas 0,188 km<sup>2</sup>. Pulau ini tergolong dalam pulau yang datar, hal ini diketahui dari pengamatan dilapangan bahwa ketinggian pulau tidak sampai 3 meter di atas permukaan laut (mdpl), yaitu 1,7 mdpl. Berdasarkan informasi dari Dinas Pertanian dan Kelautan DKI Jakarta, Pulau Tidung Kecil setiap tahun dilanda angin puting beliung sehingga mengakibatkan pulau ini mempunyai tingkat kerentanan yang tinggi.

Posisi Pulau Tidung Kecil terletak di sebelah utara Jakarta atau Pulau Jawa yang merupakan daratan besar dengan jarak 14,40 mil laut. Pulau Tidung Kecil dapat dicapai dengan menggunakan kapal reguler dari Marina Ancol atau Muara Angke menuju Pulau Tidung Besar (Direktorat Pendayagunaan Pulau-pulau Kecil, 2014). Antara Pulau Tidung Besar dan Pulau Tidung Kecil terdapat jembatan yang menghubungkan kedua pulau (Rajak dan Suprihardjo, 2013). Sehingga perjalanan menuju Pulau Tidung Kecil bisa dilanjutkan dengan menyewa perahu maupun berjalan kaki. Biaya perjalanan menuju Pulau Tidung Besar dengan menggunakan kapal reguler sebesar Rp. 55.000,- bila ditempuh dari pelabuhan Kali Adem, dan Rp. 40.000,- bila ditempuh dari pelabuhan Muara Angke. Untuk mencapai Pulau Tidung Kecil bisa menyewa speed boat dari Pulau Tidung Besar dengan harga Rp. 100.000,-. Pusat administrasi pemerintahan berada di Pulau Pramuka dengan dari Pulau Tidung Kecil sejauh 8,08 mil laut. Berdasarkan informasi dari masyarakat terdekat, aktifitas ekonomi masyarakat pulau sekitar banyak dilakukan di pelabuhan Rawa Saban Kabupaten Tangerang. Jarak antara Pelabuhan Rawa Saban dengan Pulau Tidung Kecil menurut analisa peta Alos tahun 2010 adalah 16,90 mil laut.

Menurut hasil observasi di lapangan, Pulau Tidung Kecil merupakan pulau datar yang tidak mempunyai teluk. Jenis substrat pantai dari pulau tersebut adalah pantai berpasir dengan slope datar yang luas dan kemiringan pantai kurang dari 10°. Pulau Tidung Kecil merupakan pulau yang tidak berpenghuni yang dijadikan sebagai pusat bibit oleh Dinas Pertanian dan Kelautan Provinsi DKI Jakarta. Kondisi lahan pulau ditumbuhi pohon sukun, cemara laut, kelapa dan mangrove, mangga dan semak belukar yang tinggi. Selain itu pulau ini juga mempunyai cadangan penyimpanan air tawar yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pulau tersebut.

Berdasarkan Suku Dinas Kelautan dan Pertanian provinsi DKI Jakarta (2013) perairan

Pulau Tidung Kecil mempunyai tingkat kecerahan mencapai 6,58 meter dengan kecepatan arus mencapai 9 cm/dt. Potensi terumbu karang di pulau ini mempunyai lebar hamparan mencapai 497,02 meter dengan keragaman jenis *lifeform* mencapai 11 jenis.

Pemanfaatan Pulau Tidung Kecil mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta No. 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTRPZ). Dengan melakukan analisis terhadap peta RDTR didapatkan di Pulau Tidung Kecil tidak ada

pembagian zonasi pemanfaatan, karena menurut Perda tersebut seluruh luasan pulau diperuntukkan untuk zona perdagangan dan jasa.

Hasil penilaian kriteria investasi berdasarkan sumberdaya alam dan strategi geografi, Pulau Tidung Kecil mempunyai nilai masing-masing 2,96 untuk ketersediaan jasa lingkungan, 3,28 untuk ketersediaan sumberdaya hayati dan 2,79 untuk ketersediaan sumberdaya non hayati yang disajikan pada Tabel 2, Tabel 3 dan Tabel 4.

**Tabel 2. Hasil Penilaian Investasi Berbasis Ketersediaan Jasa Lingkungan di Pulau Tidung Kecil Tahun 2014.**

**Table 2. Investment Result Based on The Availability of Environmental Services in Tidung Kecil Island, 2014.**

No	Parameter /Parameter	Bobot/ Weight	Skor/ Score	Jumlah/ Amount
1	Luas daratan pulau kecil (Km <sup>2</sup> )/Small island area (Km <sup>2</sup> )	0.03	2	0.06
2	Ketinggian pulau kecil (mdpl)/Small island altitude(mdpl)	0.02	1	0.02
3	Tingkat kerentanan pulau kecil (frekuensi bencana)/ The vulnerability level of small island (disaster frequency)	0.05	3	0.15
4	Posisi pulau /Island position	0.01	3	0.03
5	Jarak ke pusat aktifitas ekonomi /Distance to the center of economic activity	0.03	3	0.09
6	Jarak ke administrasi pemerintahan (kabupaten) /Distance to the government administration(district)	0.02	4	0.08
7	Kemudahan mencapai PPK/Ease of reaching the small islands	0.05	3	0.15
8	Moda Transportasi/Transport Vehicles	0.05	1	0.05
9	Kondisi moda transportasi /Conditions of transport vehicles	0.04	1	0.04
10	Waktu tempuh rata-rata /Average travel time	0.03	4	0.12
11	Tingkat ketersediaan transportasi/Availability level of transport	0.04	1	0.04
12	Frekuensi perjalanan/Trip frequency	0.04	1	0.04
13	Biaya Transportasi/Transport cost	0.02	3	0.06
14	Ketersediaan sumber air tawar/Availability of freshwater resources	0.05	4	0.2
15	Jenis substrat pantai /Type of the beach substrate	0.05	5	0.25
16	Tipologi pantai /Beach typology	0.05	5	0.25
17	Kondisi ekosistem (tutupan karang hidup (%)) /Ecosystem condition (ercentage of coral reef %)	0.07	3	0.21
18	Lebar hamparan datar karang (m) /Width of the flat of coral(m)	0.07	4	0.28
19	Struktur fisik pulau/The physical structure of island	0.03	1	0.03
20	Biota unik sebagai obyek pemanfaatan /Unique biota as an object of utilization	0.05	1	0.05
21	Jumlah lokasi pemanfaatan/ Number of utilization area	0.05	3	0.15
22	Daya dukung lokasi pemanfaatan PPK/Carrying capacity of utilization area of small islands	0.05	5	0.25
23	Lebar Pantai (m)/Width Of The Beach(m)	0.07	3	0.21
24	Kemiringan Pantai /Slope of the beach	0.03	5	0.15
Total/Total				2.96

Modifikasi dari : Yulianda (2007); Adrianto et al. (2011) dalam Direktorat Pendayagunaan Pulau-pulau Kecil (2011)/  
Modification of: Yulianda (2007); Adrianto et al. (2011) in Direktorat Pendayagunaan Pulau-pulau Kecil (2011).

**Tabel 3. Hasil Penilaian Investasi Berbasis Ketersediaan Sumber Daya Hayati di Pulau Tidung Kecil Tahun 2014.**

**Table 3. Investment Result Based on The Availability of Biological Resources in Tidung Kecil Island, 2014.**

No	Parameter//Parameter	Bobot/ Weight	Skor/ Score	Jumlah/ Amount
1	Luas daratan pulau kecil (Km <sup>2</sup> )/ <i>Small island area (Km<sup>2</sup>)</i>	0.03	2	0.06
2	Ketinggian pulau kecil (mdpl)/ <i>Small island altitude(mdpl)</i>	0.02	1	0.02
3	Tingkat kerentanan pulau kecil (frekuensi bencana) / <i>The vulnerability level of small island (disaster frequency)</i>	0.04	3	0.12
4	Jarak ke pusat aktifitas ekonomi/ <i>Distance to the center of economic activity</i>	0.04	3	0.12
5	Jarak ke administrasi pemerintahan (kabupaten) / <i>Distance to the government administration(district)</i>	0.04	4	0.16
6	Kemudahan mencapai PPK/ <i>Ease of reaching the small islands</i>	0.05	3	0.15
7	Moda Transportasi/ <i>Transport Vehicles</i>	0.04	1	0.04
8	Kondisi moda transportasi/ <i>Conditions of transport vehicles</i>	0.04	1	0.04
9	Waktu tempuh rata-rata/ <i>Average travel time</i>	0.05	4	0.2
10	Tingkat ketersediaan transportasi/ <i>Availability level of transport</i>	0.04	1	0.04
11	Biaya Transportasi/ <i>Transport cost</i>	0.05	3	0.15
12	Ketersediaan air tawar (tingkat kecukupan) / <i>Availability of freshwater resources</i>	0.05	4	0.2
13	Potensi dan jenis pemanfaatan / <i>Potential and type of utilization</i>	0.06	2	0.12
14	Kecerahan perairan (%) / <i>Water transparency</i>	0.06	4	0.24
15	Luas Areal pemanfaatan / <i>Total utilization area</i>	0.06	4	0.24
16	Keterlindungan lokasi pemanfaatan / <i>Protection of the utilization area</i>	0.06	3	0.18
17	Tingkat sensitivitas lokasi terhadap pencemaran dari luar / <i>Sensitivity level of contamination from outside location</i>	0.06	5	0.3
18	Kondisi oseanografi (kecepatan arus (cm/dtk))/ <i>Cceanographic condition (cm/sec)</i>	0.06	5	0.3
19	Penutupan Lahan Pulau / <i>Land cover of the island</i>	0.05	3	0.15
20	Kedalaman Terumbu Karang (m) / <i>The depth of coral reef(m)</i>	0.05	5	0.25
21	Jenis lifeform / <i>Lifeform type</i>	0.05	4	0.2
Total/ <i>Total</i>				3.28

Modifikasi dari : Yulianda (2007); Adrianto et al. (2011) dalam Direktorat Pendayagunaan Pulau-pulau Kecil (2011)/  
Modification of : Yulianda (2007); Adrianto et al. (2011) in Direktorat Pendayagunaan Pulau-pulau Kecil (2011).

**Tabel 4 Hasil Penilaian Investasi Berbasis Ketersediaan Sumber Daya Non Hayati di Pulau Tidung Kecil Tahun 2014.**  
**Table 4 Investment Result Based on The Availability of Non-Biological Resources in Tidung Kecil Island, 2014.**

No	Parameter /Parameter	Bobot/ Weight	Skor/ Score	Jumlah/ Amount
1	Luas daratan pulau kecil (km <sup>2</sup> ) / <i>Small island area (km<sup>2</sup>)</i>	0.07	2	0.14
2	Ketinggian pulau kecil (mdpl)/ <i>Small island altitude(mdpl)</i>	0.07	1	0.07
3	Tingkat kerentanan pulau kecil (frekuensi bencana)/ <i>The vulnerability level of small island (disaster frequency)</i>	0.07	3	0.21
4	Jarak ke pusat aktifitas ekonomi/ <i>Distance to the center of economic activity</i>	0.05	3	0.15
5	Jarak ke administrasi pemerintahan (kabupaten) / <i>Distance to the government administration(district)</i>	0.05	4	0.2
6	Kemudahan mencapai PPK/ <i>Ease of reaching the small islands</i>	0.05	3	0.15
7	Moda Transportasi/ <i>Transport vehicles</i>	0.05	1	0.05
8	Kondisi moda transportasi/ <i>Conditions of transport vehicles</i>	0.04	1	0.04
9	Waktu tempuh rata-rata/ <i>Average travel time</i>	0.04	4	0.16
10	Tingkat ketersediaan transportasi/ <i>Availability level of transport</i>	0.05	1	0.05
11	Biaya Transportasi/ <i>Transport cost</i>	0.05	3	0.15
12	Ketersediaan air tawar (tingkat kecukupan) / <i>Availability of freshwater resources</i>	0.06	2	0.12
13	Potensi dan jenis pemanfaatan/ <i>potential and type of utilization</i>	0.05	2	0.1
14	Kecerahan perairan (%)/ <i>Water transparency(%)</i>	0.06	4	0.24
15	Luas Areal pemanfaatan/ <i>Total utilization area</i>	0.06	4	0.24
16	Keterlindungan lokasi pemanfaatan/ <i>Protection of the utilization area</i>	0.06	3	0.18
17	Tingkat sensitivitas lokasi terhadap pencemaran dari luar/ <i>Sensitivity level of contamination from outside location</i>	0.03	5	0.15
18	Kondisi oseanografi (kecepatan arus (cm/dtk))/ <i>Oceanographic condition (cm/sec)</i>	0.06	5	0.3
19	Penutupan Lahan Pulau/ <i>Land cover of the island</i>	0.03	3	0.09
<b>Total/Total</b>				<b>2.79</b>

Modifikasi dari : Yulianda (2007); Adrianto et al. (2011) dalam Direktorat Pendayagunaan Pulau-pulau Kecil (2011)/  
 Modification of: Yulianda (2007); Adrianto et al. (2011) in Direktorat Pendayagunaan Pulau-pulau Kecil (2011).

**Tata Kelola Pemerintahan**

Penilaian terhadap tata kelola pemerintahan lebih ditekankan pada sistem administrasi pengelolaan, kebijakan dan status penguasaan pulau-pulau kecil. Berbagai instrumen tata kelola pemerintahan tersebut dijadikan parameter dari kriteria tata kelola pulau-pulau kecil, selanjutnya ditentukan indikator dengan skor 1 sampai dengan 5. Secara umum semakin lengkap dan semakin baiknya parameter tata kelola pulau-pulau kecil maka semakin tinggi skor yang diperoleh.

Menurut DKI Jakarta (2014), Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta No. 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTRPZ), Pulau Tidung Kecil termasuk dalam zona perkantoran, perdagangan dan jasa di wilayah pulau. Status kepemilikan Pulau Tidung Kecil yang merupakan aset pemerintah daerah. Sehingga kewenangan pengelolaan seluruh pulau berada ditangan pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta.

Sistem perijinan investasi dalam pengelolaan pulau dilaksanakan oleh pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta secara terpusat sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah, Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, UU no. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Perda Provinsi DKI Jakarta no. 3 tahun 2012 tentang Retribusi Daerah. Dalam memberi kenyamanan pada investor, pemerintah daerah memberikan insentif berupa keringanan retribusi dan penangguhan penarikan retribusi pada investor sesuai aturan yang berlaku.

Dari data tersebut, penilaian kriteria investasi berdasarkan tata kelola pemerintahan, Pulau Tidung Kecil mempunyai nilai indek yang cukup tinggi, yaitu 4,2. Hal ini disebabkan status lahan pulau yang sudah jelas yaitu merupakan aset pemerintah sehingga akan mempermudah proses investasi. Tabel 5 menunjukkan hasil penilaian parameter dan indikator *governance index* di Pulau Tidung Kecil.

**Infrastruktur**

Beberapa infrastruktur yang tersedia di pulau-pulau kecil jika telah ada atau dikembangkan dapat dijadikan sebagai parameter dalam melakukan penilaian pengembangan investasi. Berbagai parameter dari kriteria infrasruktur mempunyai indikator untuk mementukan skor. Skor 1 sampai 5 menggambarkan kelengkapan dan kondisi infrastruktur di pulau kecil. Semakin lengkap dan

semakin baik kondisi infrastruktur di pulau kecil maka semakin tinggi skor yang diperoleh.

Berdasarkan observasi di lapangan, terdapat jalan terbuat dari paving blok dan dermaga yang dibuat oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta. Untuk keperluan listrik di pulau, pemerintah DKI Jakarta telah melakukan pemasangan kabel bawah laut sepanjang 40 kilometer yang membentang dari Tanjung Priok hingga Pulau Tidung kecil pada tahun 2007 (Indiana, 2011). Hal ini membuat kebutuhan listrik di pulau ini terpenuhi selama 24 jam.

Pulau Tidung Kecil mempunyai cadangan air bersih yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pulau. Sebagai upaya dalam memenuhi kebutuhan air bersih, di pulau ini dibangun pompa air dan jaringan air yang ditempatkan ditandon dan ditempatkan menyebar di bagian pulau untuk keperluan dalam penyiraman bibit-bibit tanaman.

Pulau Tidung Kecil belum terdapat sarana komunikasi, tetapi sinyal HP sudah bisa mencapai bagian pulau. Sinyal HP yang mencapai pulau merupakan sinyal yang berasal dari menara relay yang dibangun di Pulau Tidung Besar. Pulau Tidung Kecil mempunyai ruang pertemuan yang dibangun oleh Dinas Pertanian dan Kelautan Provinsi DKI Jakarta sebagai sarana untuk kegiatan-kegiatan kedinasan.

Hasil penilaian kriteria investasi berdasarkan infrastruktur, Pulau Tidung Kecil mempunyai nilai indeks 3,22. Tabel 6 menunjukkan hasil penilaian parameter dan indikator *infrastruktur index* di Pulau Tidung Kecil.

**Tabel 5. Hasil Penilaian Parameter dan Indikator Governance Index (GI) di Pulau Tidung Kecil tahun 2014.**

**Table 5. Result of The Scoring Parameters and Indicators of Governance Index (GI) in Tidung Kecil Island, 2014.**

No	Parameter /Parameter	Bobot/ Weight	Skor/ Score	Jumlah/ Amount
1	Perijinan /License	0.21	5	1.05
2	Peruntukan PPK dalam RTRW/Allotment of Small island in Spatial plan	0.17	5	0.85
3	Kewenangan pengelolaan PPK /Authority management	0.19	3	0.57
4	Sistem insentif dan disinsentif investasi di PPK /Incentives and disincentives system of invest in small island	0.21	3	0.63
5	Kepemilikan lahan atau tanah di PPK /Land ownership in small islands	0.22	5	1.1
Total/Total				4.2

Modifikasi dari : Adrianto et al. (2011) dalam Direktorat Pendayagunaan Pulau-pulau Kecil (2011)/ Modification of: Adrianto et al. (2011) in Direktorat Pendayagunaan Pulau-pulau Kecil (2011).

**Tabel 6. Hasil Penilaian Parameter dan Indikator *Infrastruktur Index* (II) di Pulau Tidung Kecil tahun 2014.**

**Table 6. Result of The Scoring Parameters and Indicators of *Infrastructure Index* (II) in Tidung Kecil Island, 2014.**

No	Parameter /Parameter	Bobot/ Weight	Skor/ Score	Jumlah/ Amount
1	Jenis jalan /Type of road	0.06	4	0.24
2	Kualitas jalan /Road quality	0.14	5	0.7
3	Ketersediaan sarana air bersih/Clean water availability	0.16	5	0.8
4	Ketersediaan listrik /Electricity availability	0.17	3	0.51
5	Pelabuhan/dermaga/Jetty /port/dock/jetty	0.14	2	0.28
6	Sarana komunikasi/Communication facilities	0.14	1	0.14
7	Kelengkapan fasilitas umum dan fasilitas social di PPK dan atau pulau sekitarnya/The completeness of public facilities and social facilities in small islands and the surrounding islands	0.09	5	0.45
8	Ketersediaan sarana penyediaa BBM di PPK dan atau pulau sekitarnya /Availability of the fuel in small islands and surrounding islands	0.1	1	0.1
Total/Total				3.22

Modifikasi dari : Adrianto *et al.* (2011) dalam Direktorat Pendayagunaan Pulau-pulau Kecil (2011)/  
Modification of : Adrianto *et al.* (2011) in Direktorat Pendayagunaan Pulau-pulau Kecil (2011).

### Sosial Ekonomi dan Budaya

Penilaian terhadap sosial ekonomi dan budaya ditentukan berdasarkan parameter yang dapat menggambarkan nilai pulau-pulau kecil dari aspek sosial, ekonomi dan budaya. Parameter tersebut adalah nilai sejarah pulau-pulau kecil, jumlah penduduk, kepadatan penduduk, potensi luas daratan pulau untuk pengembangan investasi, potensi ekonomi lokal, tingkat pendapatan penduduk pulau, nilai ekonomi sumberdaya pulau-pulau kecil, keamanan pulau, budaya dan adat istiadat serta presentase tingkat pendidikan. Berbagai instrumen tersebut dijadikan parameter yang mempunyai indikator dengan skor 1 sampai dengan 5. Secara umum semakin tinggi suatu parameter bisa memberikan nilai tambah dan memperbesar peluang investasi di pulau kecil maka semakin tinggi skor yang diperoleh.

Pulau Tidung Kecil merupakan pulau yang tidak berpenduduk. Pulau ini sering dimanfaatkan oleh wisatawan-wisatawan Pulau Tidung Besar untuk berekreasi. Walaupun tidak berpenduduk, pulau ini mempunyai berbagai sumberdaya alam sebagai aset pengembangan ekowisata, diantaranya adalah pantai pasir putih, terumbu karang dan mangrove.

Nilai ekonomi sumber daya Pulau Tidung Kecil dihitung berdasarkan NJOP atas tanah

dan nilai ekonomi sumber daya alam yang ada. Berdasarkan DKI Jakarta (2015), NJOP tanah di pulau adalah Rp. 285.000,00 per meter persegi. Menurut Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (2012), luasan mangrove di Pulau Tidung Kecil sebesar 0,16 ha, terumbu karang seluas 289,79 ha, dan padang lamun seluas 464,24 ha. Sehingga didapatkan total nilai ekonomi sumber daya di Pulau Tidung Kecil mempunyai nilai ekonomi sumber daya sebesar Rp. 823.787.258.128,60.

Berdasarkan luas areal dan peruntukan lahan pulau yang ada, potensi rasio areal pengembangan investasi di Pulau Tidung Kecil adalah 100 persen dari seluruh luas area pulau bisa dipergunakan untuk pengembangan investasi. Sebagai pulau yang tidak berpenduduk, keamanan di pulau ini belum sepenuhnya terjamin. Hal ini terbukti dengan adanya keterangan dari Dinas Pertanian dan Kelautan Provinsi DKI Jakarta bahwa di pulau ini sering terjadi tindak pencurian terhadap aset-aset pemerintah.

Hasil penilaian kriteria investasi berdasarkan sosial ekonomi dan budaya, Pulau Tidung Kecil mempunyai nilai 2,64. Tabel 7 menunjukkan hasil penilaian parameter dan indikator *socio economic and culture* di Pulau Tadung Kecil.

**Tabel 7. Hasil Penilaian Parameter dan Indikator Sosio Economic and Culture (SI) di Pulau Tidung Kecil tahun 2014.**

**Table 7. Result of The Scoring Paramaters and Indicators of Socio Economic And Culture (SI) in Tidung Kecil Island, 2014.**

No	Parameter /Parameter	Bobot/ Weight	Skor/ Score	Jumlah/ Amount
1	Nilai sejarah PPK / <i>Small islands historical value</i>	0.10	1	0.10
2	Jumlah penduduk (jiwa) / <i>Total population (people)</i>	0.09	5	0.45
3	Kepadatan penduduk (orang/hektar)/ <i>Population density(people/hectare)</i>	0.10	5	0.50
4	Potensi rasio luas area untuk pengembangan investassi dengan luas pulau (persen)/ <i>Potential ratio of the area for development invest with area of the island (percent)</i>	0.12	5	0.60
5	Potensi ekonomi lokal / <i>Potential of local economy</i>	0.10	1	0.10
6	Tingkat pendapatan penduduk pulau (USD per hari per KK) / <i>The level of the population income in small island (USD/day/ family)</i>	0.08	1	0.08
7	Nilai ekonomi sumberdaya PPK/ <i>Economy value of small island resources</i>	0.10	5	0.50
8	Keamanan PPK / <i>Small island security</i>	0.12	1	0.12
9	Budaya dan adat istiadat/ <i>Culture and costums</i>	0.07	1	0.07
10	Persentase tingkat pendidikan/ <i>Percentage of education level</i>	0.07	1	0.07
11	Jumlah tipe situs bersejarah dan atraksi budaya / <i>Number of historic sites and cultural attractions types</i>	0.05	1	0.05
Total/Total				2.64

Modifikasi dari : Adrianto et al. (2011) dalam Direktorat Pendayagunaan Pulau-pulau Kecil (2011)/  
Modification of : Adrianto et al. (2011) in Direktorat Pendayagunaan Pulau-pulau Kecil (2011).

### Pulau Kecil Bernilai Tinggi

Penilaian terhadap pulau kecil menggambarkan kelayakan pulau kecil untuk dimanfaatkan sebagai pengembangan investasi ekowisata. Penilaian ini mengandung beberapa faktor yang sangat dominan dalam mempengaruhi masuknya investor di pulau. Faktor tersebut terdiri dari faktor sumberdaya alam baik jasa lingkungan, sumber daya hayati maupun non hayati, faktor tata kelola pemerintahan, faktor kualitas infrastruktur, dan faktor sosial ekonomi dan budaya masyarakat setempat. Keempat faktor tersebut merupakan faktor yang sangat dominan dalam mempengaruhi investasi di pulau kecil. Kekurangan salah satu faktor dapat menyebabkan kurangnya minat investor dan bahkan dapat menghambat masuknya investor ke pulau-pulau kecil.

Dari data di atas diperoleh hasil untuk masing-masing indeks adalah *natural resources and geostrategic island index (NI)* sebesar 3,67, *governance index (GI)* sebesar 4,20, *infrastructure*

*index (II)* sebesar 3,22 dan, *socio-economic and culture index (SI)* sebesar 2,64. Dengan perhitungan menggunakan formulasi Small Island Investmen Index (SIII) maka diperoleh indeks investasi ekowisata Pulau Tidung Kecil sebesar 3,69. Dengan melihat pada Tabel 1, dengan nilai indeks sebesar 3,69 maka Pulau Tidung Kecil dapat dimasukkan ke dalam kategori siap atau layak untuk dimanfaatkan sebagai investasi ekowisata.

### KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

#### Kesimpulan

Pulau Tidung Kecil merupakan pulau kecil yang siap untuk investasi ekowisata. Pulau ini mempunyai potensi yang cukup bagus untuk dikembangkan sebagai kegiatan ekowisata. Sumberdaya alam dan jasa lingkungan yang masih bagus sehingga dapat mendukung kegiatan ekowisata. Akses menuju pulau ini juga sangat mudah dengan terdapatnya angkutan reguler ke pulau terdekat.

Status pulau merupakan aset pemerintah daerah, sehingga akan mempermudah akses bagi investor untuk masuk ke pulau ini dengan didukung regulasi, RTRW dan pelayanan perijinan satu pintu di pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Infrastruktur dasar pulau yang merupakan faktor penunjang sudah bagus. Dengan adanya dermaga yang memadahi membuat pulau siap disinggahi langsung oleh kapal besar maupun kecil. Pulau disekitar pulau ini merupakan pulau yang berpenduduk, sehingga bisa menjadi penunjang dalam investasi ekowisata.

### Implikasi Kebijakan

Pembangunan sarana komunikasi dan penyedia BBM dapat dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan penilaian terhadap Pulau Tidung Kecil. Dengan semakin baik kualitas dan kelengkapan infrastruktur di pulau diharapkan dapat menambah nilai kelayakan investasi di pulau tersebut. Pulau Tidung Kecil merupakan pulau tidak berpenghuni, peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dilakukan terhadap pulau-pulau kecil disekitar dalam satu kawasan. Peningkatan sumber daya manusia pulau kecil merupakan jaminan tersedianya tenaga kerja yang berkualitas di kawasan pulau yang siap bekerja.

### DAFTAR PUSTAKA

Camileri, S. J. dan J. Falzon. 2013. The Challenges of Productivity Growth in the Small Island States of Europe: A Critical Look at Malta and Cyprus. *Island Studies Journal* Vol 8 (1): 131-164

Dahuri, R. 2013. Pengelolaan Pembangunan Pulau-pulau Kecil Secara Optimal dan Berkelanjutan. Bahan Kuliah : Pengelolaan Sumberdaya Pulau-pulau Kecil. IPB. Bogor.

Direktorat Pendayagunaan Pulau-pulau Kecil. 2014. Kepulauan Seribu dan Teluk Jakarta DKI Jakarta. KKP. Jakarta.

\_\_\_\_\_. 2014. Penataan Investasi Pulau-pulau Kecil. [http://www.kp3k.kkp.go.id/index.php/arsip/c/1/Penataan-Investasi-Pulau-pulau-Kecil/?category\\_id=7](http://www.kp3k.kkp.go.id/index.php/arsip/c/1/Penataan-Investasi-Pulau-pulau-Kecil/?category_id=7). (diakses 23 April 2014).

\_\_\_\_\_. 2012. Laporan Identifikasi Potensi Pulau-pulau Kecil di DKI Jakarta. KKP. Jakarta.

\_\_\_\_\_. 2011. Kriteria Pulau-pulau Kecil Yang Bernilai Ekonomi Tinggi Untuk Mendukung Investasi. KKP. Jakarta.

\_\_\_\_\_. 2011. Direktori Pulau-pulau Kecil Provinsi DKI Jakarta. KKP. Jakarta.

Elroy, J. L. dan H. Lucas. 2014. A Note On The Significance Of Geographic Location In Island Studies. *Island Studies Journal*. Vol 9 (2) : 363 – 366.

Indiana. 2011. Seluruh Kepulauan Seribu Nikmati Listrik. <http://www.jakarta.go.id/v2/statrec/detail/1078>. (diakses, 18 Mei 2015).

Isrok. 2009. Korelasi Antara Peraturan Daerah (Perda) Bermasalah Dengan Tingkat Investasi Ke Daerah. *Jurnal Hukum* No 4 : 551 – 568.

Kementerian Negara Lingkungan Hidup. 2001. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 4 Tahun 2001 tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang. Jakarta.

Pandiadi dan S. H. Warsono. 2012. Daya Tarik Investasi Berdasarkan Kondisi Prasarana dan Sarana Dipusat Pertumbuhan. *Jurnal Ketransmigrasian* Vol. 29 : 82 – 95.

Poirine, B. 2014. The Significance Of Geographic Location In Island Studies: A Rejoinder. *Island Studies Journal* Vol 9 (2): 373 – 376.

Rajak, A. dan R. Suprihardjo. 2013. Pengembangan Kawasan Pariwisata Terpadu di Kepulauan Seribu. *Jurnal Teknik POMITS* Vo. 2(1).

Republik Indonesia. 2014 . Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Diperbanyak oleh Dirjen KP3K. KKP. Jakarta

Suku Dinas Kelautan dan Pertanian. 2013. Laporan Akhir Pekerjaan : Identifikasi dan Inventarisasi Terumbu Karang dan Biota Laut di Kepulauan Seribu. Kabupaten Kepulauan Seribu – Provinsi DKI Jakarta

Suparno. 2009. Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Sebagai Salah Satu Dokumen Penting Untuk Disusun Oleh Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten/ Kota. *Jurnal Mangrove dan Pesisir* IX (1): 1- 8

Surapati, B. F. 2012. Museum Ikan Paus Dibangun di Pulau Tidung Kecil. <http://www.jakarta.go.id/v2/news/2014/12/museum-ikan-paus-dibangun-di-pulau-tidung-kecil#.VVuBrFKPzeM>. (diakses 18 Mei 2015).